

**EVALUASI KEBIJAKAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH DI
KABUPATEN BANDUNG**

***POLICY EVALUATION OF MICRO SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES IN
BANDUNG REGENCY***

Bintang Putri Latifatul Robbani¹

Rafih Sri Wulandari²

^{1,2)} Program Studi Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Langlangbuana

Email: bintangkecil@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini dilatar belakangi oleh belum optimalnya evaluasi kebijakan terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kabupaten Bandung. Berdasarkan latar belakang peneliti mengidentifikasi masalah sebagai berikut: Bagaimana Evaluasi Kebijakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kabupaten Bandung. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Evaluasi Kebijakan dari William Dunn Dalam Subarsono (2011:126) yang meliputi empat dimensi yaitu Efektivitas, Efisien, Kecukupan, Pemerataan, Responsivitas, Ketepatan. Berdasarkan pada pendekatan teori tersebut, peneliti merumuskan proposisi Evaluasi Kebijakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kabupaten Bandung akan berjalan maksimal apabila melaksanakan indikator yang meliputi yaitu Efektivitas, Efisien, Kecukupan, Pemerataan, Responsivitas, Ketepatan. Metode yang digunakan metode kualitatif dengan deskriptif. Adapun teknik pengumpulan data diperoleh melalui: Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi. Hasil dari observasi dan wawancara tersebut menghasilkan data-data yang kemudian di analisa oleh peneliti sebagai dasar untuk penejelasan dan pemaparan lebih lanjut dalam penelitian ini. Hasil dari penelitian dari Evaluasi Kebijakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kabupaten Bandung belum berjalan optimal karena belum secara optimal dalam dimensi Efektivitas, Efisien, Kecukupan, Pemerataan, Responsivitas, Ketepatan. Hal ini disebabkan masih banyak oknum-oknum aparatur yang masih belum bisa memenuhi 6 indikator tersebut. Masih banyak hal-hal yang belum terealisasikan sehingga program kebijakan yang direncanakan belum sampai kepada semua Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kabupaten Bandung.

Kata Kunci: Evaluasi, Kebijakan

ABSTRACT

This research is motivated by the not optimal evaluation of policies on micro and small and medium enterprises in Bandung Regency. Based on the background of the researcher identifies the problem as follows: How to evaluate micro small and medium business policies in Bandung Regency. The theory used in this study is the policy evaluation theory of William Dunn in Subarsono (2011: 126) which includes four

-

dimensions, namely effectiveness, efficient, adequacy, equity, responsiveness, accuracy. Based on the theory approach, researchers formulate propositions of evaluation of micro small and medium business policies in Bandung Regency will run optimally when carrying out indicators which include effectiveness, efficient, adequacy, equity, responsiveness, accuracy. The method used qualitative methods with descriptive. The data collection techniques are obtained through: observation, interviews, and documentation. The results of the observations and interviews produce data which are then analyzed by researchers as a basis for further explanation and explanation in this study. The results of research from the evaluation of micro small and medium business policies in Bandung Regency have not been running optimally because they have not been optimally in the dimensions of effectiveness, efficient, adequacy, equity, responsiveness, accuracy. This is because there are still many elements of the apparatus who still cannot meet the 6 indicators. There are still many things that have not been realized so that the planned policy program has not yet reached all micro and small and medium enterprises in Bandung Regency.

Keywords: *Evaluation, Policy*

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Kabupaten Bandung merupakan salah satu daerah di Provinsi Jawa Barat dimana dalam perkembangannya tidak luput dari pertumbuhan UMKM setiap tahunnya. Dari tahun ketahun jumlah UMKM di Kabupaten Bandung menunjukkan pertumbuhan yang cukup tinggi. Selain itu keberadaan UMKM juga hendaknya diharapkan dapat memberi kontribusi yang cukup baik terhadap kesejahteraan masyarakat khususnya dalam upaya penanggulangan masalah-masalah yang sering dihadapi seperti tingginya tingkat kemiskinan, besarnya jumlah pengangguran, ketimpangan distribusi pendapatan dan segala aspek yang tidak baik. UMKM ini diharapkan akan membangun perekonomian daerah agar lebih maju dan lebih baik lagi terutama dalam mengatasi permasalahan ekonomi di daerah. Dengan partisipasi dan kreatifitas masyarakat maka dalam pembangunan ekonomi ini dikit demi sedikit perekonomian bisa bangkit. Hal ini tergambar dalam misi Kabupaten Bandung yang ke-1 (satu) yaitu meningkatkan daya saing perekonomian daerah dengan penguatan ekonomi kerakyatan berbasis

partisipasi masyarakat yang menjunjung tinggi kreatifitas dalam bingkai kearifan local.

Adapun dukungan dalam Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bandung N0. 6 Tahun 2021 tentang kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan usaha mikro yaitu:

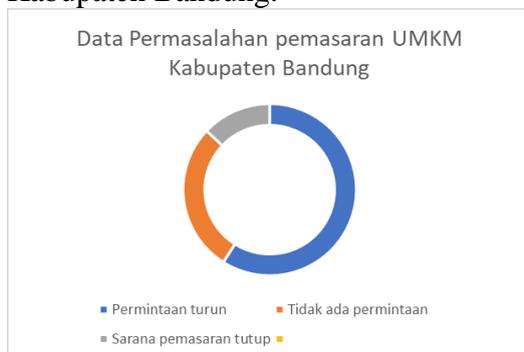
- a. bahwa usaha mikro merupakan salah satu pendorong perekonomian daerah yang mampu memperluas lapangan kerja dalam rangka pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa untuk mengoptimalkan peran usaha mikro dalam perekonomian daerah diperlukan keberpihakan pemerintah daerah dengan memberikan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan usaha mikro;
- c. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan hukum dalam memberikan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan usaha mikro di daerah diperlukan pengaturan yang dapat menjamin keberlangsungan usaha mikro;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf

a, huruf b, dan huruf perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Usaha Mikro;

Dengan adanya PERDA tersebut pemberdayaan serta pengembangan UMKM lebih jelas dan terarah, namun perlu ditindak lanjuti dengan pedoman petunjuk pelaksanaan teknis agar PERDA tersebut mudah untuk dilaksanakan.

Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Kabupaten Bandung memiliki program yang mendukung UMKM ini yaitu Program Pelatihan Kewirausahaan UMKM Kabupaten Bandung dan Program Dana Bergulir Penyertaan Bantuan Modal

Permasalahan yang ada di Kabupaten Bandung mengenai UMKM yaitu masih banyak yang memiliki kendala dengan pemasaran, sebab para pelaku usaha masih belum bisa memasarkan produk dengan maksimal. Salah satu kendalanya adalah tidak ada sentra atau pusat pemasaran produk-produk UMKM yang berasal dari Kabupaten Bandung.



Sumber: Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bandung (2022)

Dari data diatas menunjukkan pelaku UMKM merasakan permasalahan mengenai pemasaran yang mengakibatkan dimana 28% UMKM tidak memiliki permintaan akan produknya dan 13% UMKM Kabupaten Bandung tidak memiliki sarana pemasaran. Kemudian sisanya sebanyak 59% UMKM mengalami penurunan permintaan.

Namun dalam hal ini pemerintah tidak bisa melakukan sosialisasi mengenai pemasaran

UMKM ini secara menyeluruh dan tidak bisa langsung dijalankan semuanya dalam satu waktu, sehingga dalam memperbaiki masalah ini butuh proses yang panjang sampai akhirnya dapat terpenuhi secara maksimal.

Hal tersebut merupakan masalah penting untuk diteliti dalam rangka mengoptimalkan kemajuan UMKM. Dari fenomena tersebut diatas, ditemukan indikasi – indikasi yang menunjukkan belum Optimalnya Evaluasi Kebijakan UMKM antara lain:

1. Pelaku UMKM di Kabupetan Bandung masih bingung dalam memasarkan produknya dan meningkatkan penjualannya.
2. Rendahnya pemahaman serta pengetahuan pelaku UMKM Kabupaten Bandung khususnya pengetahuan mengenai manajemen pemasaran menyebabkan hambatan dalam melakukan kegiatan pemasaran bagi usahanya.
3. Beberapa UMKM Kabupaten Bandung ditemukan tidak mengetahui target pasar yang ingin dicapai untuk produknya,rendahnya pemahaman dasar mengenai pemasaran seperti bauranpemasaran (marketing mix) yang dapat membantu mencapai target atau kesuksesan usaha dengan mendatangkan keuntungan maksimal.
4. Pelaku UMKM merasa bingung untuk berinovasi mengikuti perkembangan jaman dan pemahaman mengenai branding dikalangan UMKM pun masih asing, dimana pemahaman mengenai branding beberapa pelaku UMKM jauh dari cukup.
5. Pelaku UMKM merasa jika memiliki logo dan kemasan sudah cukup melakukan branding
6. Kurangnya sosialisasi dari pemerintah mengenai program

UMKM terhadap proses pemasaran bagi UMKM.

7. Belum meratanya bantuan serta sosialisasi kepada masyarakat mengenai program-program UMKM.

Pada dasarnya seluruh kegiatan termasuk program UMKM pada tahun-tahun sebelumnya ini berjalan dengan sesuai, namun karena adanya pandemi Covid-19 serta kurangnya sosialisasi dan perhatian pemerintah terhadap UMKM ini maka kegiatan ini masih banyak yang belum tuntas.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Evaluasi Kebijakan

Menurut (Nugroho 2009) Setiap evaluasi kebijakan memiliki ciri-ciri tertentu yang dapat dijadikan sebagai patokan bagi seorang analis untuk melakukan evaluasi terhadap suatu kebijakan. Ciri-ciri evaluasi kebijakan dimaksud di antaranya:

1. Tujuannya menemukan hal-hal strategis, untuk meningkatkan kinerja kebijakan,
2. Evaluator mampu mengambil jarak dari pembuat kebijakan, pelaksana, dan target kebijakan,
3. Prosedur dapat dipertanggungjawabkan secara metodologis,
4. Dilaksanakan tidak dalam suasana permusuhan dan kebencian,
5. Mencakupi rumusan, implementasi, lingkungan, dan kinerja kebijakan.

Tanpa evaluasi, suatu kebijakan publik tidak dapat ditinggalkan. Mengevaluasi kemandirian kebijakan publik dalam mencapai tujuannya adalah tujuan penilaian kebijakan. Akibatnya, penilaian merupakan komponen penting dari proses pembuatan kebijakan publik (Winarno, 2012).

Menurut definisi yang diberikan oleh para ahli tersebut, evaluasi kebijakan merupakan tahapan akhir yang krusial dari suatu kebijakan dan prosedur untuk melakukan evaluasi terhadap kebijakan

tersebut. Penilaian kebijakan juga berfungsi untuk menetapkan apakah suatu kebijakan sesuai dengan keinginan atau tidak, untuk memutuskan kebijakan masa depan yang akan diberlakukan.

2.2 Tujuan dan Fungsi Evaluasi

Menurut (Arifin. 2011: 12) tujuan evaluasi pembelajaran adalah untuk mengetahui keefektifan dan efisiensi sistem pembelajaran, baik yang menyangkut tentang tujuan, materi, metode, media, sumber belajar, lingkungan maupun sistem penilaian itu sendiri.

Sejalan dengan tujuan evaluasi di atas, evaluasi yang dilakukan memiliki banyak fungsi. menurut (Jihad & Haris. 2012) fungsi evaluasi adalah:

1. Formatif Evaluasi yang dilaksanakan ditengah program pembelajaran digunakan sebagai umpan balik, baik peserta didik maupun pendidik. Berdasarkan hasil tes, pendidik dapat mengetahui kelemahan peserta didik dan dari situ dapat dilakukan perbaikan.
2. Sumatif Tes sumatif dalam pelaksanaan evaluasi hasil belajar biasanya dilakukan pada akhir program pengajaran, misalnya pada akhir kwartal, akhir semester, dan akhir tahun ajaran. dengan begitu dapat menentukan naik atau tidaknya, lulus atau tidaknya.
3. Selektif Dengan fasilitas terbatas, maka evaluasi dapat dipakai untuk menyeleksi masukan (input) guna disesuaikan dengan ruangan, tempat duduk atau fasilitas lain yang tersedia.
4. Diagnostik Evaluasi dapat pula untuk mengungkapkan kesulitan-kesulitan peserta didik. Prosesnya dapat dilakukan pada permulaan kegiatan belajar mengajar (KBM), selama berlangsung ataupun pada akhir KBM.

5. Motivasi apabila subyek didik tahu bahwa dalam KBM yang peserta didik jalani tidak dilakukan evaluasi maka akibatnya sudah dapat dibayangkan peserta didik enggan untuk belajar. Dengan demikian keinginan belajar peserta didik diharapkan meningkat.

3. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu untuk mengetahui dan menggambarkan kenyataan dari kejadian yang diteliti sehingga memudahkan untuk mendapatkan data yang objektif, dalam rangka mengetahui Evaluasi Kebijakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kabupaten Bandung. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yang memusatkan kepada fakta dan menggunakan analisis perbandingan untuk melakukan generalisasi empiris terhadap fenomena-fenomena sosial.

Menurut Moloeng, (2007: 6) menjelaskan penelitian kualitatif adalah penelitian dengan tujuan untuk memahami fenomena mengenai apa yang dialami subyek penelitian secara menyeluruh dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata serta bahasa, pada konteks khusus yang dialami serta dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Penelitian kualitatif menekankan pada kedalaman data yang didapatkan oleh peneliti. Semakin dalam dan detail data yang didapatkan, maka semakin baik kualitas dari penelitian kualitatif ini. Berbeda dengan kuantitatif, objek dalam penelitian kualitatif umumnya berjumlah terbatas. Dalam penelitian ini, peneliti ikut serta dalam peristiwa atau kondisi yang sedang diteliti. Untuk itu hasil dari penelitian ini memerlukan kedalaman analisis dari peneliti. Selain itu, hasil penelitian ini bersifat subjektif sehingga tidak dapat digeneralisasikan. Secara umum, penelitian kualitatif dilakukan dengan metode wawancara dan observasi.

4. PEMBAHASAN

4.1 Evaluasi Kebijakan Usaha Mikro Kecil Menengah Kabupaten Bandung.

Pada Bab ini, peneliti mendeskripsikan seluruh data hasil wawancara dan Observasi lapangan terkait dengan Evaluasi Kebijakan Usaha Mikro Kecil Menengah Kabupaten Bandung. dengan menggunakan metode Kualitatif. Dalam metode kualitatif, peneliti mengumpulkan instrument kunci dalam suatu penelitian sehingga peneliti mengumpulkan sendiri data melalui dokumentasi, observasi, dan wawancara dengan para partisipan. Peneliti juga terus focus mempelajari makna yang disampaikan oleh para partisipan tentang masalah penelitian. Sehingga peneliti harus paham secara menyeluruh terhadap permasalahan – permasalahan yang ada di lapangan. Dalam interpretasinya Evaluasi Kebijakan Usaha Mikro Kecil Menengah Kabupaten Bandung, peneliti melakukan studi dokumentasi yang ada pada Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bandung sebagai pelaksana kebijakan ini yang meliputi data terkait Usaha Mikro Kecil Menengah. Peneliti juga melakukan observasi dan wawancara terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam kebijakan ini, wawancara meliputi Aparatur Pemerintah yaitu JFT Pengembang Kewirausahaan Ahli Muda dan Tenaga Ahli Pengolah Data UMKM.

Evaluasi Kebijakan Usaha Mikro Kecil Menengah Kabupaten Bandung, program tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dalam arti pengembangan dan pemberdayaan agar kelangsungan hidup, perekonomian dan kemakmuran masyarakat lebih di prioritaskan.

Dalam menganalisis Evaluasi Kebijakan Usaha Mikro Kecil Menengah Kabupaten Bandung, peneliti juga memakai analisis berdasarkan teori William Dunn dalam Subarsono (2011:126) seperti berikut:

a. Efektivitas

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah populer

mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan. Efektivitas di definisikan oleh para pakar dengan berbeda-beda tergantung pendekatan yang digunakan oleh masing-masing pakar. Menurut Beni (2016: 69) Efektivitas adalah hubungan antara output dan tujuan atau dapat juga dikatakan merupakan ukuran seberapa jauh tingkat output, kebijakan dan prosedur dari organisasi.

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan peneliti bersama dengan Kepala JFT Pengembang Kewirausahaan Ahli Muda Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro pada Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bandung bahwa setiap program telah disalurkan dan dilaksanakan sebagai mestinya. Sehingga pelaku usaha UMKM telah mengikuti program dan sosialisasi terkait UMKM agar setiap UMKM bisa jauh lebih berkembang dengan baik.

Mengenai efektivitas program, pada dasarnya efektivitas berhubungan dengan derajat keberhasilan suatu operasi pada sektor publik sehingga suatu kegiatan dikatakan efektif jika kegiatan tersebut mempunyai pengaruh besar terhadap kemampuan menyediakan pelayanan masyarakat yang merupakan sasaran yang telah ditentukan. Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti bersama dengan Kepala JFT

Pengembang Kewirausahaan Ahli Muda Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro pada Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bandung bahwa:

“Di DPA Kami yaitu ada Program Pengembangan Usaha Mikro dan Pemberdayaan Usah Mikro disitu. Tentunya mungkin dengan rancangan yang ada terdahulu di RPMJ di Kabupaten Bandung mungkin ini diarahkan untuk Pengembangan dan Pemberdayaan Usaha Mikro tentunya keberhasilan atau apapun itu tidak hanya dari pemerintahannya juga tentunya dari kami disini dan juga para Pelaku UMKM, jadi saling sinergi dan berhubungan dengan kami sebagai Pemerintah dna juga para UMKM selaku pelaku itu. Tentunya untuk menyerap dalam program ini mungkin kami juga disini di program pengembangan dan pemberdayaan sesuai dengan apa yang telah di programkan dalam RPJ Kabupaten Bandung ya tentunya kami sesuai melaksanakan tugas sesuai dengan apa yang ada di bidang kami.”

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat dilihat bahwa program yang dijalankan masih ragu akan keberhasilan karena dapat dilihat bahwa penentu keberhasilan bukan hanya dari sisi Pemerintah saja, melainkan dari sisi pelaku UMKM itu sendiri. Karena dari sisi Pemerintah, mereka sudah melaksanakan tugas dengan semestinya, yang artinya mereka menggap bahwa program yang dijalankan sudah baik. Sedangkan dari sisi pelaku UMKM masih belum jelas akan keberhasilan dari program UMKM yang dijalankan oleh Pemerintah

b. Efisiensi

Dalam hubungannya dengan kinerja organisasi, maka ukuran baik buruknya kinerja diukur oleh efektivitas dan efisiensi. Dikatakan efektif bila mencapai tujuan, dikatakan efisien bila hal itu memuaskan sebagai pendorong mencapai tujuan. Yang berarti efektivitas dari kelompok tersebut dapat dicapai sesuai dengan kebutuhan yang direncanakan. Sedangkan efisien berkaitan dengan jumlah pengorbanan yang dikeluarkan dalam upaya mencapai tujuan organisasi.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti bersama dengan Kepala JFT Pengembang Kewirausahaan Ahli Muda Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro pada Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bandung bahwa:

“Sangat efisien, karena dalam setiap program itu kan selalu ada sosialisasi dari pihak pemerintah, kemudian ke kecamatan, lalu ke desa. Apalagi soal bantuan dana bergulir, itu salah satu program yang ada di UMKM, jadi pihak pemerintah bekerjasama dengan pihak Bank. Kalau kami memang selalu sesuai dengan apa yang ada di DPA kami untuk pelaksanaan program, kami juga selalu ada penilaian kinerja. pelaksanaan, sisanya mungkin akan dimulai lagi pada bulan ini sampai akhir tahun. Kemudian juga sekarang dalam program semua memudahkan para pelaku UMKM, apalagi dengan adanya Pusat Layanan Usaha Selain itu juga segala informasi adanya program atau pelatihan segala macam kita pun update di web sehingga memudahkan sekali bagi

pelaku UMKM. Jadi menurut saya sudah efektif dan efisien.”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat dilihat bahwa indikator efisien yang dimaksud adalah efisien dari segi waktu dalam pemberian informasi yang di dapat karena segala informasi mengenai program, pelatihan, sosialisasi, serta informasi yang didapat memang bisa diakses dimana saja. Sehingga tidak menghabiskan banyak waktu, tenaga dan biaya dalam melakukan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh pelaku UMKM.

Sementara itu, indikator efisien lainnya dapat dilihat dari biaya bantuan yang diberikan, apakah dapat memenuhi tujuan utama diberikannya bantuan tersebut, yaitu untuk membantu dalam proses perkembangan dan pemberdayaan UMKM yang ada di Kabupaten Bandung. Peneliti juga mewawancarai salah satu pelaku usaha UMKM di Kabupaten Bandung, menurut pandangannya bahwa pemberian bantuan seperti dana bergulir ini belum efisien karena kurangnya input yang diberikan dan tidak tepat guna. Karena menurutnya, bantuan yang diberikan tidak sesuai dengan kebutuhan.

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan, peneliti menyimpulkan bahwa pada dasarnya dalam setiap program yang dilakukan seperti bantuan, pelatihan maupun sosialisasi sudah efisien dalam segi informasi dan proses nya. Namun, dalam pemberian bantuan berupa dana bergulir masih harus di pantau walaupun dalam pemberian bantuan dana ini sudah tepat sasaran pada pelaku UMKM sudah menggunakan bantuan dana

tersebut agar UMKM nya dapat berjalan lebih berkembang.

c. Kecukupan

Kecukupan merupakan salah satu indikator evaluasi. Definisi Kecukupan menurut KBBI yaitu tidak kurang, dapat memenuhi kebutuhan atau memuaskan. Kecukupan pada dasarnya berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektifitas memuaskan kebutuhan, nilai atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah. Kriteria kecukupan menekankan pada kuatnya hubungan antara alternatif kebijakan dan hasil yang diharapkan. Mengenai indikator kecukupan, peneliti telah melakukan wawancara bersama dengan Kepala JFT Pengembang Kewirausahaan Ahli Muda Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro pada Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bandung bahwa:

Dari wawancara yang telah dilakukan, peneliti menarik kesimpulan bahwa kecukupan dalam penyaluran program UMKM dalam hal bantuan ini memang belum mencukupi, akan tetapi akan sangat membantu bagi pemilik UMKM.

d. Pemerataan

Dengan memberikan dan mencapai keadilan melalui tujuan kebijakan publik, kesetaraan dalam kebijakan publik dapat dianggap bermakna. Kebijakan yang berorientasi pemerataan adalah kebijakan yang hasil atau upayanya tersebar secara merata. Jika biaya dan manfaat didistribusikan secara merata, suatu program mungkin efektif, efisien, dan memadai. Keadilan penting untuk kesetaraan. Peneliti telah mewawancarai Kepala JFT

Pengembang Kewirausahaan Ahli Muda Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro pada Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bandung bahwa:

”Kita berusaha maksimal untuk bisa merata, akan tetapi kenyataannya belum merata. Karena ada kalanya masyarakat kita itu yang berada diluar jangkauan internet, mereka tidak mendapatkan informasi. Atau bahkan mereka telat mendapatkan informasi, sehingga mereka menganggap ini adalah hal yang tidak tersampaikan ke mereka. Tapi kami sudah berusaha untuk memaksimalkan hal ini akan tetapi kenyataannya masih ada pelaku pelaku UMKM yang merasa bahwa setiap program yang kami lakukan belum tersampaikan sehingga mereka tidak mengetahui adanya program seperti bantuan dana bergulir, pelatihan, ataupun sosialisasi lainnya.”

Pelaku UMKM di Kabupaten Bandung, berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti bersama dengan Kepala JFT Pengembang Kewirausahaan Ahli Muda Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro pada Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bandung bahwa:

“Kita memang harus responsif atas segala masalah dan keluhan para pelaku UMKM apalagi kita berada di Kabupaten Bandung yang merupakan tingkat Daerah, karena sesuai dengan visi misi Kabupaten Bandung yaitu BEDAS, diharapkan dengan adanya yang digulirkan oleh pemerintah tentunya untuk kesejahteraan masyarakat. Karena itu sudah tugas kami. Kami berusaha untuk cepat tanggap atas apapun yang ada dilapangan, makanya kami kerahkan anggota

kami di setiap kecamatan agar bisa mengawasi demi kelancaran UMKM. Kami juga menyediakan Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) untuk menampung jika ada kendala atau apapun itu sehingga itu bisa membantu. Kami selalu berusaha sebaik mungkin secepat mungkin untuk merespon segala hal yang ada di lapangan.”

Secara umum responsivitas berarti kepuasan yang diperoleh penerima manfaat. Berdasarkan wawancara tersebut terlihat bahwa Dinas Koperasi Kabupaten Bandung melakukan sarana yang disebut Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT

wawancara yang telah dilakukan, peneliti menyimpulkan bahwa responsivitas dalam penyampaian informasi mengenai program UMKM, bantuan yang ada, serta sosialisasi dan pelatihan sudah cukup memuaskan pelaku UMKM. Selain itu juga Pemerintah cukup baik dalam menanggapi permasalahan yang dirasakan oleh para pelaku UMKM. Hal ini terlihat dari kepuasan pelaku UMKM dan upaya Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bandung agar setiap informasi, bantuan, sosialisasi maupun pelatihan dapat digunakan sebagai mestinya.

f. Ketepatan

Ketepatan merujuk pada nilai atau harga dari tujuan-tujuan program dan kepada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan tersebut. Mengenai indikator ketepatan dalam penyaluran Program UMKM peneliti telah mewawancarai Kepala JFT Pengembang Kewirausahaan Ahli Muda Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro pada Dinas Koperasi

dan UKM Kabupaten Bandung bahwa:

“Kalau kami sudah sesuai, tepat sasaran dan kami rasa sudah tepat mengenai program-program, bantuan, kemudian sosialisasi dan sebagainya. Karena kami koordinasi dengan Desa, kemudian Desa mengusulkan untuk UMKM kegiatan, misalnya ada pameran nih, Desa mengusulkan di Desa tersebut ingin ada kegiatan pameran. Tentunya kami harus ke Desa tersebut, jadi mana UMKM yang akan melaksanakan pameran tersebut. Jadi, tentunya kami begitu sesuai dengan program-program kami ke pelaku usaha.”

Pada dasarnya secara teknis dan prosedur yang ada semua program UMKM yang dijalankan sudah dilaksanakan dengan tepat. Akan tetapi yang terjadi dilapangan tidak selalu sesuai dengan teori yang ada. Berdasarkan hasil wawancara yang telah diperoleh dapat disimpulkan bahwa informasi dan penyaluran dari program UMKM maupun bantuan UMKM masih belum sepenuhnya tepat sasaran. Banyak dari pihak masyarakat yang berbohong memiliki usaha padahal sebenarnya tidak memiliki usaha agar mendapatkan bantuan tersebut, tidak hanya itu terdapat oknum-oknum aparat dari pemerintah yang melakukan kecurangan. Sehingga perlu dilakukan verifikasi di lapangan sebelum program-program UMKM seperti bantuan digulirkan dengan benar kemudian dilakukan pengawasan yang berkala agar program yang di salurkan sesuai dengan sasaran dan tepat guna.

4.2 Faktor Pendukung dan Penghambat Evaluasi Kebijakan Usaha Mikro Kecil Menengah Kabupaten Bandung.

a. Faktor Pendukung

1. Terdapat dukungan berupabantuan dana dari pemerintah terhadap pelaku-pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
2. Terdapat dukungan fasilitas Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) bertujuan untuk memberikan layanan pendampingan usaha yang inklusif dan pemberdayaan lainnya kepada Pelaku UMKM, UMK dan Wirausaha secara komprehensif dan terpadu untuk meningkatkan produktivitas, nilai tambah, kapasitas dan kualitas kerja, daya saing dan pemulihan usaha Koperasi, para Pelaku UMKM, dan Wirausaha.

b. Fungsi Penghambat

Pada pelaksanaan Evaluasi Kebijakan Usaha Mikro Kecil Menengah Kabupaten Bandung tidak selalu lancar.

Berdasarkan hasil wawancara dari observasi yang dilakukan peneliti, terdapat beberapa hambatan yang dialami dalam proses Evaluasi Kebijakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kabupaten Bandung, antara lain:

1. Sosialisasi yang dilakukan masih belum merata dan belum efektif, sehingga masih banyak pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang masih belum bisa memahami mekanisme dalam Program yang diberikan Pemerintah mengenai Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kabupaten Bandung.
2. Belum meratanya bantuan yang diberikan kepada pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah sehingga modal yang diberikan masih kurang.
3. Ketidaktepatan sasaran terhadap bantuan yang diberikan sehingga Pelaku Usaha Mikro Kecil dan

Menengah yang memang membutuhkan tidak menerima bantuan.

5. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti mengemukakan simpulan sebagai berikut:

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Evaluasi Kebijakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kabupaten Bandung melalui dimensi Efektivitas, Efisiensi, Kecukupan, Pemerataan, Responsivitas, dan Pemerataan masih belum berjalan sesuai dengan harapan, terdapat faktor penghambat antara lain: Dalam proses penyaluran program UMKM, terkadang banyak terdapat hambatan di lapangan. Salah satunya yaitu tidak tepat sasaran dan kurang tepat guna. Kurangnya pengawasan terhadap UMKM yang menginginkan bantuan sehingga tidak tepat sasaran dalam penyaluran segala program selain itu kurangnya verifikasi langsung kelapangan terkait program bantuan UMKM terhadap pelaku UMKM atau calon penerima bantuan guna memastikan bahwa pelaku UMKM memang merupakan pelaku UMKM. Selanjutnya kurangnya monitoring dan evaluasi yang merata oleh petugas terhadap pelaku UMKM yang sudah menjalani program UMKM sehingga menyebabkan tidak semua pelaku UMKM usaha nya dapat berkembang dengan baik seperti pelaku UMKM lainnya. Kemudian kurangnya anggaran yang diberikan oleh pemerintah, karena mengingat bahwa jumlah pelaku UMKM di Kabupaten yang sangat banyak sehingga masih banyak pelaku UMKM yang belum menerima program bantuan. Selain itu faktor penghambat selanjutnya adalah kualitas sumber daya manusia yang kurang berkualitas terutama dilingkungan pemerintahan karena terdapat banyak oknum-oknum aparatur sipil Negara yang tidak menyalahgunakan jabatan dan wewenangnya. Tidak hanya oknum aparatur tetapi dari masyarakat sendiri pun

bisa menghambat proses dari keberhasilan program-program UMKM ini yaitu masih ada masyarakat yang licik akan program bantuan yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

Adi, I. R. (2001). *Pem-berdayaan, Pengembangan Mas-yarakat dan Intervens Komunitas*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

Adi, I. R. (2013). *Intervensi Komunitas dan Pengembangan*

Masyaraka t sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat . Jakarta: Rajawali Press.

Anwar, O. M. (2012). *Pemberdayaan Masyarakat di Era Global* . Bandung: Alfabeta.

Dahlia, F. (2013). *Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Ekonomi Kreatif di Kampung Wisata Pasir Kunci Kota Bandung*. Bandung.

Emzir. (2016). *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.

Hikmat, H. (2006). *Strategi Pemberdayaan Masyarakat* . Bandung: Humaniora Utama Press.

Jahja, A. S. (2006). *Modul Pengantar Ekonomi Makro*. Jakarta: STIE Perbanas.

Mardikanto, T. d. (2012). *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung: CV Alfabeta Abu Huraerah .

Moh. Ali Azi, R. S. (2005). *Dakwah Pemberdayaan Masyarakat Paradigma Aksi Metodologi*. Yogyakarta: Pustaka Pesantren.

Moleong, L. J. (2009). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Najiyati, S. A. (2005). *Pemberdayaan Masyarakat di Lahan Gambut* . Bogor: Wetlands Internasional - IP.

Osmani. (2000). *Participatory Govenance, People's Empowerment and Poverty*. Washington: UNDP.

Soetomo. (2013). *Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Subanar, H. (2001). *Manajemen Usah Kecil*. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta, Fakultas Ekonomi UGM.

Suharto, E. (2005). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: PT Refika Aditama.

Sulistiyani, A. T. (2004). *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan* . Yogyakarta: Gaya Media.

Sumodiningrat, G. (1999). *Pemberdayaan Masyarakat dan JPS*. Jakarta: Pustaka Utama.

Usman, H. (1995). *Metodologi Penelitian Sosial*. Bandung : Bumi Aksara.

Usman, S. (2004). *Pembangunan dan Pemberdayaan* . Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset.

Utami, D. A. (2019). *Buku Pintar Pemberdayaan Masyarakat Desa*. Temanggung: Desa Pustaka Indonesia.

b. Peraturan dan Undang-Undang Lainnya

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bandung N0. 6 Tahun 2021 tentang kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan usaha mikro.

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pedoman Organisasi Pemerintah Desa dan Perangkat Desa